

Pancasila sebagai Landasan Pendidikan dan Penanggulangan Pengangguran

R. Mumu Abdul Muthi¹, Ridha Aviani² Supriyono³

¹Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia

Universitas Pendidikan Indonesia, jalan setiabudi no 229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Email : radenmumu13@upi.edu, ridhaaviani13@upi.edu, supriyono@upi.edu

Abstract. *This research raises the topic "Pancasila as a Foundation for Education and Overcoming Unemployment" with the aim of understanding the foundation of education in Pancasila. Through literature study methods, we have identified Pancasila, education and unemployment. Pancasila is the ethics and morals of the Indonesian nation in the sense that it is the common core of the various morals that are actually found in Indonesia that are able to overcome all factionalism in Indonesia. Pancasila is the basis of the national philosophy as well as the Indonesian nation's philosophy of life, in fact it is a systematic, fundamental and comprehensive set of values. So Pancasila is a unity that is round and intact, hierarchical and systematic. The results of this research highlight the importance of understanding and maintaining values in the context of Pancasila in order to strengthen the moral and ethical foundations of Indonesia's national development.*

Keywords: *Pancasila Education unemployment*

Abstrak. *Penelitian ini mengangkat topik "Pancasila sebagai Landasan Pendidikan dan Penanggulangan Pengangguran" dengan tujuan untuk memahami landasan pendidikan dalam Pancasila. Melalui metode studi kepustakaan, kami telah mengidentifikasi Pancasila, pendidikan dan pengangguran. Pancasila adalah etika dan moral bangsa Indonesia dalam arti merupakan inti bersama dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia yang mampu mengatasi segala paham golongan di Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Maka Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman dan pemeliharaan nilai-nilai dalam konteks Pancasila guna memperkuat landasan moral dan etika pembangunan nasional Indonesia*

Kata kunci: Pancasila Pendidikan pengangguran

1. PENDAHULUAN

Pancasila adalah landasan falsafah bangsa Indonesia; sebagai ideologi dan falsafah, Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan. Menurut Semadi (2019), salah satunya berada di bidang pendidikan. Akibatnya, Pancasila dapat digunakan sebagai landasan dasar negara dalam membina sistem persekolahan untuk mencapai tujuan pelatihan publik. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi nasional dapat digunakan untuk membentuk pendidikan. Ini harus didasarkan pada nilai-nilai kebhinekaan atau Pancasila. Selain itu, filsafat pendidikan yang berbasis Pancasila dapat digunakan sebagai landasan ilmiah untuk memberikan standar dan pedoman untuk meningkatkan kualitas pendidikan. (Giri, Ardini and Kertiani, 2021)

Pancasila adalah etika dan moral bangsa Indonesia, yang mampu mengalahkan semua tokoh politik di Indonesia. Pancasila memuat sifat-sifat dan kemampuan yang teratur, utama dan luas sebagai landasan penalaran bernegara dan cara berpikir hidup negara Indonesia. Statuta menjadi solidaritas yang efisien, beragam, dan disesuaikan (Wibowo, 2020)

Mungkin perspektif utama dalam keberadaan manusia adalah pelatihan. Penegasan ini dapat dipahami berdasarkan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor filosofis. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa pelatihan adalah suatu proses pertukaran informasi dari satu zaman ke zaman lainnya. Jenis informasi yang dipindahkan juga unik. Ini cenderung berupa informasi umum, seperti menghitung, membaca, atau menulis, serta informasi tentang nilai, seperti nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, antara lain. (Cathrin, 2019)

Indonesia memiliki kemampuan untuk membentuk generasi yang memiliki integritas moral dan etika dengan memasukkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kerangka pendidikan. (Putra, Febrian *and* Musa, 2023)

Efendi, Y., dan Sa'diyah, H. (2020) mengatakan tugas utama Pancasila pada lembaga pendidikan adalah untuk memberikan dasar moral kepada siswa. Dewi dan Dinie mengutip pernyataan ini. Siswa harus didorong untuk bertindak sesuai dengan ketentuan Pancasila, terutama dalam implementasi K-13. Nilai-nilai karakter bangsa ini harus tercermin dalam kegiatan di sekolah. (Kartini *and* Dewi, 2021)

Nilai-nilai Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Karena bermula dari karakter negara, sifat-sifat inilah yang menjadi landasan dan motivasi utama dalam melakukan segala perbuatan besar dalam kehidupan sehari-hari dan membantu negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai Pancasila hendaknya diterapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena kehadiran Pancasila dalam pedoman dapat memberikan semangat kepada semua orang disekitarnya, baik di dalam maupun di luar, untuk menjaga peraturan yang disesuaikan dengan Pancasila. Pancasila terdiri dari nilai-nilai seperti keyakinan Tuhan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan, dan keadilan. Untuk mencapai tujuan yang sama, nilai-nilai tersebut bersatu. (Amelia *and* Dewi, 2021)

Sesuai dengan perspektif Pancasila sebagai kepribadian negara yang akan mencerminkan visi dan melandasi cara berpikirnya yang edukatif, perlu dicatat bahwa Pancasila tumbuh melalui proses kausalitas, bukan hanya ide-ide yang berasal dari pemikiran individu. Nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia sebelum menjadi dasar negara. (Sutono, 2015)

Pengangguran sudah menjadi permasalahan yang umum dan kompleks di suatu daerah, karena tidak hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki landasan pendidikan yang rendah namun juga menyasar pada masyarakat yang memiliki landasan pendidikan yang tinggi. Meskipun jumlah lulusan sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun, beberapa pengamat keuangan memperkirakan bahwa pengangguran di negara-negara berkembang didominasi oleh pengangguran yang berpendidikan tinggi dan berusia muda. (Adriyanto, Prasetyo and Khodijah, 2020)

2. METODE

Metodologi yang dipakai guna menyusun artikel ini ialah studi kepustakaan. Ini berarti membaca buku, artikel jurnal, dan referensi tentang Pancasila sebagai landasan pendidikan dan penanggulangan pengangguran. Selain itu, penelitian sejenis dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan sah.

Studi kepustakaan adalah setiap upaya diselesaikan oleh seorang ilmuwan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan tema atau permasalahannya, menurut Syaibani (2012), yang dikutip Azizah. Informasi ini dapat berasal dari laporan penelitian, disertasi, tesis, buku, ensiklopedia, peraturan, tahunan, buku, dan sumber lain yang tercetak atau elektronik. (Azizah, 2017) Namun, Zed (2014) dalam buku Lestari dan Nursalim menyatakan bahwa studi kepustakaan mencakup menghimpun informasi dan data dari berbagai sumber dan kemudian membacanya sebagai bahan penelitian. Proses pengolahan data juga diperlukan untuk jenis penelitian ini. (Lestari and Nursalim, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pancasila

Dua kata sansekerta "panca", yang berarti lima, dan "sila", yang berarti prinsip atau asas. Oleh karena itu, kemampuan Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap penduduk Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila mengandung nilai-nilai kesucian, kemanusiaan, solidaritas, pemerintahan mayoritas, dan keadilan.. Pancasila bukan hanya gagasan sederhana yang tidak memiliki dasar yang kuat; itu adalah dasar negara yang berasal dari nilai-nilai moral kepribadian bangsa Indonesia, termasuk nilai agama, sosial, dan budaya yang telah ada sejak awal berdirinya. (Ramadhan et al., 2022)

Dalam konteks sejarah nusantara, definisi "pancasila" masih sangat sederhana, mencakup hanya mengatur cara hidup seseorang dalam masyarakat atau dianggap sebagai aturan tingkah laku yang baik dan penting (dikenal sebagai "syiila"). Namun, hal ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa istilah pancasila sebenarnya tidak asing bagi masyarakat.

Pancasila kini memiliki makna yang lebih luas sebagai dasar dari tatakenegaraan Indonesia. Penafsiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah berubah dari tahun 1945 hingga saat ini (tahun 2006). Pada hakikatnya, berbagai penafsiran tersebut adalah upaya masuk akal dan filosofis untuk memutuskan bagaimana Pancasila seharusnya dibentuk. (Sudarso, 2006)

Prinsip-prinsip Filsafat Pancasila

Berikut ini adalah ringkasan dari bagaimana Pancasila dilihat menurut sudut pandang kausal Aristoteles. A. Sebab-sebab realis, yaitu sebab-sebab yang berkaitan dengan materi atau materi, dimana Pancasila bergantung pada sifat-sifat kemasyarakatan dan kemasyarakatan yang ada di Indonesia sendiri; B. Sebab-sebab formalis, yang menyinggung alasan-alasan yang berhubungan dengan strukturnya, dimana Pancasila sebagaimana diacu pada pendahuluan UUD 1945 memenuhi kebutuhan formal (kebenaran formal); C. Penyebab kemahiran, yang mengacu pada upaya BPUPKI dan PPKI untuk membuat Pancasila menjadi dasar. Salah satu Substansi Pancasila adalah sebagai berikut: a. kesalehan, yang merupakan pendorong utama; B. umat manusia, yang merupakan makhluk individu dan sosial; C. solidaritas, yang menyebabkan solidaritas mempunyai karakter tersendiri; D. individu-individu yang merupakan komponen utama negara, yang harus bekerja sama dan berkolaborasi; juga, e. keadilan, yaitu memberi keadilan pada diri sendiri dan orang lain yang berhak atasnya. (Semadi, 2019)

Nilai-nilai Pancasila

Nilai adalah gagasan tentang apa yang seseorang anggap penting dalam hidupnya. Ada dua bagian nilai: mental dan penuh perasaan. Nilai terdiri dari pemikiran, gagasan, dan refleksi (Simon, 1986). Nilai merupakan sesuatu yang ada dalam hati manusia yang memberi landasan dan standar moral. Nilai ini berfungsi sebagai standar kualitas, produktivitas, atau kehormatan jiwa (potensi). "Nilai" pada awalnya seperti pemikiran manusia, yang merupakan potensi dasar manusia. Pengalaman tidak menunjukkan nilai. Dia ada di jiwa manusia. Menurut Simon (1986), nilai sebenarnya adalah jawaban yang benar dan jujur dari pertanyaan "apa yang Anda benar-benar, benar-benar, inginkan."

Dunia estetika dan etika mencakup studi nilai. Studi tentang bagaimana orang melihat keindahan dan apa yang mereka sukai biasanya berfokus pada estetika. Misalnya, membahas rambut panjang, pria dengan anting-anting, nyanyian bising, serta jenis seni lain. Namun, etika biasanya berfokus pada penelitiannya tentang aturan atau cara manusia berperilaku. Pertanyaan mengenai yang benar serta salah kerap kali mengarah pada ungkapan etika. Pada dasarnya, studi etika adalah studi tentang etika, yang berarti mencari tahu apa yang benar dan salah. (Semadi, 2019)

Pendidikan

Pendidikan ialah hal esensial pada kehidupan individu, yang berarti bahwa itu harus diberikan kepada semua orang di Indonesia dan diharapkan untuk terus berkembang. Pendidikan secara umum berfungsi sebagai proses kehidupan dalam membantu setiap orang mengembangkan diri mereka sendiri sehingga mereka bisa hidup dan hidup. Jadi, mendapatkan instruksi sangatlah penting. Individu diajarkan untuk menjadi individu yang berguna bagi bangsa, bangsa, dan negara. Pendidikan pertama yang diterima setiap orang diberikan di keluarga (pendidikan informal), sekolah (pendidikan formal), dan masyarakat (pendidikan nonformal). (Alpian et al., 2019)

Perundang-undangan Sistem Pendidikan No.20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat”. (Pristiwanti et al., 2022)

Fungsi Pendidikan

Pendidikan berfungsi untuk meniadakan sumber pengalaman keterbelakangan dan keterbelakangan individu, dan kemampuan pendidikan Indonesia menyatakan bahwa kemampuan pendidikan masyarakat untuk membentuk kapasitas dan pembangunan negara yang mulia untuk menjadikan kehidupan negara lebih cerdas (Sujana, 2019)

Tujuan Pendidikan

Humani lahir dengan tiga bagian utama. Mereka terdiri dari tubuh atau tubuh, jiwa dan jiwa. Yang pertama, khususnya tubuh, berkreasi sesuai sunatullah, artinya tubuh manusia akan tumbuh dan berkembang seperti tumbuhan dan makhluk lainnya setelah mendapatkan nutrisi yang cukup. Sementara itu, jiwa dan otak berkreasi untuk menyelidiki dirinya sendiri melalui siklus instruktif. Ketiganya adalah unit yang sudah jadi serta tidak

dapat dipecahkan. Akibatnya, tujuan pendidikan tidak boleh mengabaikan setiap aspek dasar manusia agar setiap individu dapat Sementara itu, jiwa dan otak berkreasi untuk menyelidiki dirinya sendiri melalui siklus instruktif. Ketiganya adalah unit yang sudah jadi. (Syafe'i, 2015)

Pancasila sebagai Landasan Pendidikan

Sebagai dasar filosofis bagi sistem pendidikan di Indonesia, Pancasila merujuk pada konsep-konsep nilai dan prinsip dasar. Terdiri dari lima sila, Pancasila adalah dasar negara Indonesia:

Ketuhanan Yang Maha Esa: Mempercayai dan mengakui bahwa Tuhan adalah kekuatan tertinggi. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya membangun karakter dan moral yang didasarkan pada nilai-nilai agama dalam pendidikan.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghormati martabat setiap orang tanpa memandang ras, agama, suku, atau gender. Ini tercermin dalam pendidikan dengan mengajarkan toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Persatuan Indonesia: Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam konteks keberagaman. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang memiliki rasa nasionalisme dan rasa persatuan.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan Permusyawaratan dan Perwakilan: Menciptakan tatanan sosial yang demokratis dan partisipatif. Ini menunjukkan betapa pentingnya belajar berpikir kritis, berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta membuat keputusan.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menjamin keadilan dalam segala aspek kehidupan, seperti kesetaraan pendidikan. Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pintu terbuka yang setara kepada semua orang.

Pancasila sebagai landasan pendidikan menekankan pada pembangunan karakter, moral, dan keterampilan siswa untuk menjadi warga yang dapat diandalkan, adil, dan cinta persatuan. Konsep ini juga membantu mencapai tujuan pembangunan nasional dengan menerapkan prinsip-prinsip demokratis dalam pengelolaan sistem pendidikan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam pendidikan, diharapkan akan terbentuk usia muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga memiliki nilai-nilai luhur dan komitmen terhadap keadilan, persatuan, dan kemajuan bangsa.

Pengangguran

Pengangguran sudah menjadi permasalahan yang umum dan kompleks di suatu daerah, karena tidak hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki landasan pendidikan yang rendah namun juga menasar pada masyarakat yang memiliki landasan pendidikan yang tinggi. Meskipun jumlah lulusan sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun, beberapa pengamat keuangan memperkirakan bahwa pengangguran di negara-negara berkembang didominasi oleh pengangguran yang berpendidikan tinggi dan berusia muda (Adriyanto, Prasetyo and Khodijah, 2020).

Pengertian Pengangguran

Menurut Sukirno, yang dikutip Rifqi, pengangguran didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan tingkat kompensasi tertentu, namun tidak mendapatkan posisi yang ideal. Banyaknya pengangguran di wilayah tertentu merupakan permasalahan yang tidak hanya mencakup bidang moneter. Sebaliknya, masalah pengangguran terkait erat dengan sektor sosial dan pendidikan. Di era modern ini, tidak hanya orang-orang dengan pendidikan rendah yang menganggur; banyak orang dengan pendidikan tinggi juga menganggur. (Muslim, 2014)

Menurut Mankiw, yang dikutip oleh Tri Widayati, Pengangguran adalah apa yang terjadi ketika seseorang yang berada dalam angkatan kerja perlu mencari pekerjaan baru namun tidak dapat melakukannya. Seseorang yang menganggur namun tidak berhasil mencari pekerjaan juga tidak dianggap sebagai pengangguran. Ketidakteraturan dalam pasar kerja dapat menyebabkan pengangguran. Ini menunjukkan kuantitas buruh yang diiklankan lebih besar daripada yang diminta. (Yulistiyono et al., 2021)

Jenis-jenis Pengangguran

Pengangguran adalah individu yang perlu bekerja namun belum mempunyai pekerjaan. Ada tiga macam pengangguran: 1. Pengangguran Terselubung (Masked Joblessness) adalah angkatan kerja yang tidak bekerja sepenuhnya karena alasan-alasan tertentu; 2. Setengah Pengangguran adalah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam setiap minggunya; dan 3. Pengangguran Terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan (Franita, Harahap and Sukriah, 2019).

Menurut Nanga (2001), Ada tiga jenis pengangguran di negara agraris: a. Pengangguran Terselubung: hal ini terjadi karena kurangnya lapangan kerja dalam perekonomian. Pengangguran semacam ini disebut juga pengangguran yang tidak mengganggu. Pekerjaan yang berlebihan menyebabkan pengalihan beberapa pekerjaan dari

latihan ini ke latihan lain. Pengangguran terselubung merupakan masalah umum di negara-negara berkembang, khususnya di bidang pertanian. B. Pengangguran Sese kali: Pengangguran sese kali merupakan masalah umum di bidang pertanian di negara-negara berkembang. Pengangguran sese kali ditandai dengan pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam waktu dekat. C. Pengangguran terselubung: Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kelebihan penduduk di wilayah pertanian telah mempercepat laju urbanisasi. Tidak semua orang akan mencari pekerjaan di komunitas perkotaan karena kecepatan relokasi lebih tinggi dibandingkan kapasitas wilayah perkotaan di negara-negara berkembang untuk mendapatkan pekerjaan baru. Oleh karena itu, banyak dari mereka mendapatkan pekerjaan dengan jam kerja lebih sedikit atau menganggur untuk jangka waktu yang sangat lama. Pengangguran jenis ini disebut sebagai pengangguran setengah. (Budiani, 2007)

Namun, menurut Sukirno (2006), yang dikutip oleh Khodijah, ada tiga jenis alasan pengangguran: 1. Pengangguran friksional terjadi ketika ekonomi memungkinkan semua orang bekerja; 2. Pengangguran struktural terjadi ketika struktur atau komposisi ekonomi berubah; dan 3. Pengangguran teknologi terjadi ketika tenaga kerja diganti oleh mesin dan bahan kimia. (Ishak, 2018)

Faktor Penyebab Pengangguran

Berikut ini adalah beberapa alasan pengangguran: kurangnya jumlah lapangan pekerjaan, kurangnya keahlian, karena banyak spesialis tidak memiliki kemampuan dasar untuk bidang yang sedang dicari, kurangnya informasi yang tersedia bagi mereka yang mencari pekerjaan, dan hilangnya dorongan dari komunitas yang mencari pekerjaan. Pencari pekerjaan (Cahyati et al., 2023)

Namun, Khodijah mengatakan bahwa ada beberapa alasan pengangguran, yaitu: 1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka yang mencari pekerjaan. 2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh Pencari kerja tidak setara dengan posisi terbuka yang tersedia di Indonesia. Salah satu faktor penyebab meningkatnya angka pengangguran di Indonesia adalah banyaknya SDM yang tidak memiliki kemampuan. Elemen lainnya adalah tidak adanya waktu istirahat di malam hari, banyaknya jumlah pekerjaan di kota, dan tidak adanya waktu istirahat kerja di malam hari. 5. Upaya pemerintah untuk memberikan kemampuan halus dalam mempersiapkan diri untuk mengurangi gaya hidup apatis yang justru menyiksa para pencari kerja, sehingga memudahkan mereka untuk menyerah dalam mencari peluang kerja. (Ishak, 2018)

Pancasila sebagai Penanggulangan Pengangguran

Pancasila, dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila, tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana menangani pengangguran, tetapi prinsip-prinsipnya dapat digunakan untuk menangani masalah ini. Pancasila dapat digunakan sebagai landasan untuk penanggulangan pengangguran dalam beberapa cara berikut:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Ide ini menunjukkan bahwa ada banyak agama dan kepercayaan yang berbeda. Pemerintah dapat mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan kesempatan yang setara untuk semua individu, tidak peduli apa agama atau keyakinan mereka, dalam upaya memerangi pengangguran.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Ide ini menekankan kebutuhan akan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah dapat membuat kebijakan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan akses pendidikan yang merata.

Sila Persatuan Indonesia: Menggalakkan kerjasama antara pemerintah, wilayah rahasia dan masyarakat pada upaya memerangi pengangguran. Untuk memberi peluang kepada mereka yang menganggur, program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil dapat ditingkatkan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Pemikiran ini menggarisbawahi betapa pentingnya peran masyarakat dalam siklus dinamis ini. Untuk memastikan solusi pengangguran yang efektif dan inklusif, pemerintah dapat melibatkan masyarakat saat membuat kebijakan dan program yang berkaitan dengan penanggulangan pengangguran.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Ide ini mengatakan harus ada kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Pemerintah dapat mengembangkan program ekonomi yang inklusif yang memberikan peluang kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam risiko pengangguran, dalam upaya menangkal pengangguran.

Secara keseluruhan, Pancasila memberikan fondasi filosofis untuk membangun masyarakat yang berkeadilan sosial, adil, dan merata. Untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi semua warga negara Indonesia, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan dan program yang berfokus pada penanggulangan pengangguran dengan merangkul prinsip-prinsip ini.

4. SIMPULAN

dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan, pancasila adalah landasan pendidikan dan pemberantasan kemiskinan. semangat gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi dapat

menjadi pedoman untuk sistem pendidikan yang merata dan program penanggulangan kemiskinan yang berhasil. adapun beberapa saran yang kami kaji dalam penelitian kami diantaranya yaitu :

1. pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai pancasila: meningkatkan pendidikan yang memasukkan nilai-nilai pancasila ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran untuk menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab, peduli sosial, dan berkontribusi positif pada masyarakat.
2. penyediaan pelatihan dan keterampilan: pemerintah dan lembaga pendidikan dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan menyediakan orang dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui program pelatihan dan kursus
3. pemberdayaan masyarakat: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan yang berbasis gotong royong dan keadilan sosial untuk meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi penurunan.
4. kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah: pemerintah dapat mendukung dan menginsentif usaha kecil dan usaha kecil agar mereka dapat berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
5. pembinaan karakter dan moral: pembentukan karakter dan moral harus menjadi fokus utama pendidikan pancasila

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan kerja dan faktor yang mempengaruhi pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, 11(2), 463–440.
- Alpian, Y., et al. (2019). Pentingnya pendidikan bagi manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(1), 66–72.
- Amelia, L., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai Pancasila sebagai pendidikan moral bagi anak bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 1(5), 193–197.
- Azizah, A. (2017). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. *State University of Surabaya*.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Cahyati, S. C. A., et al. (2023). Analisa pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 47–55.
- Cathrin, S. (2019). Pancasila sebagai landasan etis pendidikan di Indonesia. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2).

- Franita, R., Harahap, A. F. D., & Sukriah, Y. (2019). Analisa pengangguran di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 88–91.
- Giri, I. P. A. A., Ardini, N. L., & Kertiani, N. W. (2021). Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 12(1), 116–126.
- Ishak, K. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan implikasi terhadap indeks pembangunan di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 22–38.
- Kartini, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila dalam pendidikan sekolah dasar. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 113–118.
- Lestari, M. D., & Nursalim, M. (2020). Studi kepustakaan faktor-faktor penyebab “school refusal” di sekolah dasar. *Jurnal BK Unesa*, 11(4), 565–582.
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran terbuka dan determinannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(2), 171–181.
- Pristiwanti, D., et al. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911–7915.
- Putra, F. S. D., Febrian, A., & Musa, M. (2023). Pancasila sebagai landasan filosofis kebijakan pendidikan nasional di era revolusi industri 4.0. *JP3M: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 501–507.
- Putri, G. E., Misnawati, M., Syahadah, D., Sari, Y., Ummy, R., & Nurfitria, I. (2023). Pengamalan nilai profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran pada era digital di SMPN 6 Palangka Raya. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 171–190.
- Ramadhan, M. A., et al. (2022). Peranan Pancasila di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(03), 78–84.
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 82–89.
- Sudarso, S. (2006). Pengembangan sistem filsafat Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 16(1), 42–56.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29–39.
- Sutono, A. (2015). Meneguhkan Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1).
- Syafe'i, I. (2015). Tujuan pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 151–166.
- Wibowo, B. A. (2020). Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan karakter Kurikulum 2013. *Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 10–19.
- Yulistiyono, A., et al. (2021). Bonus demografi sebagai peluang Indonesia dalam percepatan pembangunan ekonomi. *Penerbit Insania*.